

**INVENTARIS ARSIP
SEKRETARIAT NEGARA RI YOGYAKARTA
(DESEMBER 1949-SEPTEMBER 1950)**

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

Sejarah Arsip

Inventaris

I. KESEKRETARIATAN

- A. Kepegawaian
- B. Keuangan
- C. Protokoler
- D. Perlengkapan
- E. Dokumentasi

II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- A. Status Wilayah
- B. Organisasi
- C. Pengaturan Pegawai
- D. Anggaran
- E. Perpajakan
- F. Peredaran Uang
- G. Agama
- H. Pendidikan
- I. Kesejahteraan Sosial

III. LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA

IV. SIKAP POLITIK

V. PERTAHANAN KEAMANAN

VI. PERADILAN

DAFTAR INDEKS

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Konferensi Meja Bundar (KMB), maka Indonesia berbentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) beribukota di Jakarta, sedangkan Republik Indonesia (RI) dengan ibukotanya di Yogyakarta, di bawah RIS. Sejak saat itu RI tidak lagi memiliki kedaulatan dalam hubungan negara luar negeri.

Sebagai kelanjutan KBM tersebut, pemerintah di Yogyakarta mengalami perubahan. Presiden RI Ir. Soekarno, diangkat menjadi presiden RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Karena itu di Yogyakarta dibentuk Kabinet Peralihan (Kabinet Susanto) dan menjalankan tugas pemerintahan RI dari tanggal 20 Desember 1949 sampai 21 Januari 1950. Kemudian tugas pemerintahan dilanjutkan oleh Kabinet Halim dari tanggal 21 Januari sampai 6 September 1950 dengan Perdana Menteri Dr. Abdul Halim, dan sebagai pemangku jabatan sementara Presiden RI Yogyakarta ialah Mr. Assaat. Jabatan Sekretaris Negara dipercayakan kepada Mr. Santoso sebagai pemangku jabatan sementara.

Pusat Pemerintahan RI di Yogyakarta berakhir pada tanggal 15 Agustus 1950 ketika dicapai kesepakatan bersama RI-RIS untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan itu kemudian dikenal dengan nama "Piagam Pernyataan Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang ditandatangani oleh Ir. Soekarno. Akibat dari pernyataan itu sejak tanggal 17 Agustus 1950 pemerintah RI di Yogyakarta berada dalam status demisioner, selama menunggu terbentuknya pemerintah baru Negara Kesatuan RI di Jakarta.

Sejarah Arsip

Koleksi arsip Sekretariat Negara (Setneg) RI Yogyakarta ini diserahkan Setneg ke Arsip Nasional pada tahun 1973. Sesuai dengan keadaan pada masanya arsip ini dapat dikategorikan tidak lengkap. Tidak diketemukan arsip-arsip yang pada hemat kami harus ada dan sangat penting, seperti misalnya arsip Piagam Persetujuan Pembentukan Negara Kesatuan atau Penyerahan Kembali Mandat Presiden RI oleh Mr. Assaat kepada Ir. Soekarno. Tidak ada penjelasan apapun tentang khazanah arsip ini, baik mengenai materi informasi maupun pengelolaan sebelumnya ketika penyerahan ke Arsip Nasional dilakukan.

Inventaris

Sebelum diadakan pemilahan (yaitu pemisahan arsip Setneg RI Yogyakarta dengan arsip-arsip milik lembaga-lembaga lain pada masa yang sama) jumlah seluruhnya ada 12 boks ukuran 10 cm. Setelah dilakukan pemilahan ternyata arsip Setneg hanya berjumlah 9 boks saja. Dari sejumlah itu tidak ditemukan berkas-berkas mengenai struktur organisasi dan peraturan-peraturan yang menunjukkan tugas dan fungsi dari lembaga itu sendiri. Akhirnya pelaksanaan inventarisasi dilakukan dengan cara pengelompokan masalah sebagaimana dapat dilihat pada inventaris ini. Pengaturan selanjutnya adalah dengan membuat sub masalah pada masing-masing kelompok. Untuk memperoleh gambaran secara rinci, maka dilakukan juga pengelompokan berkas yang sedapat mungkin sesuai dengan bentuk redaksinya, sehingga di dalamnya tampak hierarki kekuatan masing-masing tingkat.

Demikian buku inventaris ini kami susun dengan harapan dapat memudahkan pengguna arsip dalam penemuan kembali berkas arsip yang diperlukan.

Jakarta, 11 Agustus 1988
Penyusun,

Yedi Sunardi

**INVENTARIS ARSIP
SEKRETARIAT NEGARA RI YOGYAKARTA
(DESEMBER 1949-SEPTEMBER 1950)**

I. KESEKRETARIATAN

A. KEPEGAWAIAN

1. Sekretariat Negara (Setneg): Surat Keputusan-Surat Keputusan (SK) tanggal 14 Januari-30 September 1950 tentang gaji dan tunjangan pegawai.

1950
Salinan
1 sampul
2. Setneg: SK-SK tanggal 9 September 1950 tentang penempatan pegawai-pegawai Setneg ke instansi-instansi lain.

1950
Salinan
8 lembar
3. Setneg: SK-SK tanggal 25 Januari-25 September 1950 tentang pemberhentian pegawai-pegawai Dewan Pertahanan Negara (DPN).

1950
Salinan
Pertinggal
1 sampul
4. Setneg: Surat Keterangan-Surat Keterangan tahun 1950 tentang pegawai-pegawai Setneg yang tidak pernah bekerja sama dengan Belanda.

1950
Asli
1 sampul
5. DPN kepada para pegawainya dan instansi-instansi: Surat-surat tanggal 19 Desember-24 Mei 1950 tentang penempatan eks pegawai DPN ke instansi-instansi lain.

1949-1950
Asli
Pertinggal
1 sampul
6. Setneg: Daftar-daftar tanggal 20 Januari-1 Oktober 1950 tentang riwayat hidup pegawai.

1950
Asli
Salinan
1 sampul
7. Setneg: Proses verbal tanggal 11 Januari 1950 tentang pergantian pemegang kas keuangan Istana Presiden dari R. Seoharjo kepada R. Achmad.

1950
Asli
3 lembar

8. Setneg: Daftar-daftar tanggal 1950 tentang pegawai-pegawai Setneg yang diperbantukan.
1950
Salinan
4 lembar
9. Setneg: Daftar-daftar tanggal 1950 tentang pegawai-pegawai yang tetap ingin bekerja di daerah Yogyakarta dan sekitarnya.
1950
Asli
Salinan
1 sampul
10. Setneg: Surat-surat tanggal 18 Februari-20 Juli 1950 tentang gaji dan tunjangan bagi pegawai.
1950
Pertinggal
1 sampul

B. KEUANGAN

11. Setneg: Surat-surat tanggal 23 Desember 1949-4 Desember 1950 tentang permintaan uang persediaan per bulan untuk kas Setneg.
1949-1950
Asli
Pertinggal
1 sampul
12. Setneg kepada Kantor Pusat Perbendaharaan: Surat-surat tanggal 4 Januari-28 April 1950 tentang pengeluaran uang.
1950
Asli
Pertinggal
1 sampul
13. Jawatan-jawatan kepada Setneg: Surat-surat tanggal 28 Januari-8 Juni 1950 tentang kuitansi-kuitansi pembayaran.
1950
Asli
Turunan
11 lembar
14. Setneg: Surat-surat Permintaan Kredit Anggaran Setneg tanggal 25 Februari-20 September 1950.
1950
Asli
1 sampul

C. PROTOKOLER

15. Kementerian Keuangan: Surat Edaran (SE) Nomor 4051/Circ. tanggal 23 Maret 1950 tentang perjalanan dinas dengan kapal udara.
1950
Salinan

- 1 lembar
16. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 16 Januari 1950 tentang kunjungan Ir. Soekarno ke Jawa Timur.
- 1950
Asli
2 lembar
17. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram-telegram tanggal 19 dan 20 Februari 1950 tentang kunjungan Gatot Subroto ke Jawa Tengah.
- 1950
Asli
2 lembar
18. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 22 Februari 1950 tentang hasil kunjungan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat (RIS) ke luar negeri.
- 1950
Asli
1 lembar
19. Instansi-instansi kepada Setneg: Telegram-telegram tanggal 28 Maret-16 Agustus 1950 tentang kunjungan Pemangku Jabatan Sementara (PJS) Presiden RI Yogyakarta ke beberapa daerah.
- 1950
Asli
11 lembar
20. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 11 Mei-26 Juni 1950 tentang kunjungan raja-raja dari Sulawesi dan Sumbawa.
- 1950
Asli
11 lembar
21. Kementerian Dalam Negeri kepada Setneg: Surat rahasia tanggal 26 Agustus 1950 tentang kunjungan wakil direktur Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden, Dr. J. van Zwaal, di Madura.
- 1950
Asli
2 lembar
22. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 10 dan 12 Juni 1950 tentang penyambutan kunjungan Presiden RIS, Ir. Soekarno, dan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru.
- 1950
Asli
1 sampul
23. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 10 Januari-8 Juni 1950 tentang pemakaian Istana Kepresidenan untuk berbagai keperluan.
- 1950
Asli
Pertinggal

10 lembar

24. Kementerian Penerangan kepada PJS. Presiden: Surat tanggal 5 Juni 1950 tentang permohonan untuk bertemu.

1950
Asli
2 lembar
25. Setneg dengan Detasmen III Brigade 17: Surat tanggal 13 dan 17 Mei 1950 tentang pemakaman 3 orang anggota brigade yang bersangkutan.

1950
Asli
Pertinggal
5 lembar
26. Organisasi-organisasi massal PJS Presiden: Surat-surat tanggal 10 Februari-25 Juni 1950 tentang permintaan bantuan biaya untuk kongres organisasi-organisasi yang bersangkutan.

1950
Asli
9 lembar
27. Setneg: Surat keterangan tanggal 11 Juli 1950 tentang kendaraan Seotarjo dan KH. Dewantoro yang dilarang masuk ke halaman Istana Presiden.

1950
Pertinggal
1 lembar
28. Organisasi-organisasi massa di Pulau Jawa kepada Setneg: Surat-surat tanggal 15 Desember 1949-17 Agustus 1950 tentang ucapan selamat ulang tahun Republik Indonesia.

1949-1950
Asli
Tembusan
5 lembar
29. Organisasi-organisasi di Pulau Jawa kepada PJS Presiden: Telegram-telegram tanggal 14 Maret-23 Mei 1950 tentang ucapan syukur atas kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1950
Asli
14 lembar
30. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 15 Februari-1 September 1950 tentang undangan-undangan.

1950
Asli
1 sampul
31. Organisasi-organisasi massa kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 16 Maret-21 April 1950 tentang undangan beberapa resepsi.

1950
Asli

D. PERLENGKAPAN

32. Setneg dengan Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia (DAMRI): Surat menyurat tanggal 17 Januari-9 Desember 1950 tentang hal-hal yang berkenaan dengan kendaraan dinas.
- 1950
Asli
Pertinggal
1 sampul
33. Setneg: Surat-surat tanggal 13 dan 14 Januari 1950 tentang pernyataan periksa barang-barang dari Samarinda dan Delegasi Indonesia.
- 1950
Asli
2 lembar
34. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 18 Februari-15 Maret 1950 tentang perubahan nomor-nomor telepon di instansi-instansi tersebut.
- 1950
Asli
4 lembar
35. Setneg kepada instansi-instansi: Surat-surat tanggal 21 Februari-5 Mei 1950 tentang pembelian perlengkapan-perengkapan kantor.
- 1950
Pertinggal
1 sampul
36. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 4 Juni, 29, dan 30 Agustus 1950 tentang peminjaman alat pengeras suara.
- 1950
Asli
Pertinggal
3 lembar
37. Setneg: Daftar-daftar tanggal 1 September 1950 tentang barang-barang milik Setneg.
- 1950
Asli
Pertinggal
1 sampul
38. Setneg kepada Menteri Keuangan: Surat tanpa tanggal (tt)(1950) tentang barang-barang inventaris Istana Presiden.
- 1950
Konsep
3 lembar

E. DOKUMENTASI

40. Kementerian Agama: Diklat tanggal 28 Januari 1950 tentang Tuntutan Penerangan Daerah.
- 1950

- Stensilan
4 lembar
41. Kementerian Penerangan kepada PJS Presiden: Guntingan koran tanggal 1 Februari 1950 tentang hubungan politik antara "kanan" dan "kiri".
- 1950
Stensilan
2 lembar
42. Radio Republik Indonesia (RRI): Berita RRI tanggal 12 April 1950 tentang Andi Aziz dan BAT Worang.
- 1950
Salinan
1 lembar
43. Jawatan Penerangan Jawa Tengah: Ikhtisar Pers tanggal 24 April 1950 tentang antara lain bahasa Belanda.
- 1950
Stensilan
2 lembar
44. Kementerian Penerangan kepada PJS Presiden: Guntingan koran tanggal 4 Mei 1950 tentang Konferensi Meja Bundar (KMB).
- 1950
Stensilan
2 lembar
45. Kedutaan Besar Indonesia di Inggris: Berita Pers Inggris tanggal 29 Agustus 1950.
- 1950
Stensilan
2 lembar

II. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

A. STATUS WILAYAH

46. Undang-Undang Darurat Nomor - Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan di wilayah RIS.
- 1950
Stensilan
1 lembar
47. Undang-Undang Darurat Nomor - Tahun 1950 tentang penyelenggaraan tugas pemerintahan di Negara Madura oleh RIS.
- 1950
Salinan
2 lembar
48. Undang-Undang Tahun 1950 tentang pembentukan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera Tengah.
- 1950
Salinan
1 sampul

49. Undang-Undang Tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
1950
Salinan
1 sampul
50. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) kepada Menteri Dalam Negeri: Surat tanggal 25 Mei 1950 tentang Rencana Undang-Undang (RUU) mengenai pembentukan kota-kota dan provinsi-provinsi.
1950
Tembusan
7 lembar
51. Penghubung Pemerintah Sipil Republik Indonesia di Sumatera: Laporan tanggal 31 Januari 1950 tentang penyerahan kota-kota di Sumatera Barat dari Pemerintahan Belanda kepada Negara RI.
1950
Asli
1 jilid
52. Menteri Dalam Negeri kepada Setneg: Telegram tanggal 3 Februari 1950 tentang rencana penggabungan daerah-daerah Jawa Timur, Madura, dan Jawa Tengah kepada RI.
1950
Asli
1 lembar
53. Sekretaris Wakil Perdana Menteri kepada PJS Presiden: Radiogram tanggal 7 Februari 1950 tentang pembentukan Provinsi Aceh.
1950
Asli
1 lembar
54. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 18 Februari 1950 tentang penolakan Partai Sarikat Islam dan partai-partai lainnya terhadap pembentukan daerah swapraja bagi Kota Surakarta.
1950
Asli
1 lembar
55. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Masjumi kepada PJS Presiden: Telegram tanggal 31 Mei 1950 tentang putusan kongres yang menentang pembentukan swapraja bagi Kabupaten Indragiri.
1950
Asli
1 lembar
56. Kepala BPKNIP kepada Perdana Menteri RI: Surat tanggal 1 Agustus 1950 tentang pematangan umum mengenai keterangan pemerintah tentang pembentukan negara kesatuan.
1950
Tembusan
1 lembar

B. ORGANISASI

57. Peraturan Pemerintah Nomor 6/1950 tanggal 6 Februari 1950 tentang pembagian jawatan-jawatan yang dahulu termasuk Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Persediaan Makanan Rakyat.
- 1950
Salinan
1 lembar
58. Peraturan Pemerintah Nomor 7/1950 tanggal 3 Maret 1950 tentang penghapusan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.
- 1950
Salinan
1 lembar
59. Peraturan Pemerintah Nomor 8/1950 tanggal Januari 1950 tentang lapangan pekerjaan kementerian-kementerian.
- 1950
Konsep
1 lembar
60. Menteri Agama: SK Nomor 33/A/H.1 tanggal 21 April 1950 tentang pembubaran Kantor Koordinator Agama di Sumatera per 1 Mei 1950.
- 1950
Kutipan
1 lembar
61. Menteri Agama: SK Nomor 38/A/H.1 tanggal 3 Mei 1950 tentang pembubaran Kantor Perwakilan Agama RI di Jakarta per 1 Mei 1950.
- 1950
Kutipan
1 lembar
62. Menteri Agama: SK Nomor 39/A/H.1 tanggal 3 Mei 1950 tentang pembentukan panitia penyelesaian serah terima Kantor Agama RI ke Kantor Agama Provinsi Jawa Barat.
- 1950
Kutipan
1 lembar
63. Menteri Agama: SK Nomor 109/A/E-1 tanggal 24 Juni 1950 tentang pembentukan Panitia Hari dan Bulan Islam dalam tahun masehi 1951.
- 1950
Kutipan
2 lembar
64. Menteri Agama: SK Nomor 120/A/C-2 tanggal 7 Juli 1950 tentang pembentukan panitia penyelenggara pendirian Perguruan Tinggi Islam.
- 1950
Turunan
2 lembar

65. Menteri Keuangan: SK Nomor TNU.P6/1/7 tanggal 19 Januari 1950 tentang pembentukan Inspeksi Thesauri Negara di tiap-tiap provinsi.
- 1950
Salinan
2 lembar
66. Menteri Keuangan: SK Nomor TNU.1/7/11 tanggal 2 Februari 1950 tentang penghapusan Kantor Pengawas Kas Negara RI di Bukittinggi.
- 1950
Salinan
1 lembar
67. Menteri Keuangan: SK Nomor UU 3/1/15 tanggal 18 Februari 1950 tentang perubahan nama Pusat Urusan Lelang menjadi Bagian Urusan Lelang di bawah Kantor Pusat Kementerian Keuangan.
- 1950
Kutipan
1 lembar
68. Menteri Keuangan: SK Nomor TNUP.6/4/22 tanggal 2 Mei 1950 tentang kedudukan Inspeksi Thesauri Negara RI di daerah-daerah.
- 1950
Kutipan
1 lembar
69. Menteri Keuangan: SK Nomor TNU 1/27/1 tanggal 12 Juni 1950 tentang pembentukan panitia verifikasi untuk memeriksa pekerjaan Komisaris RI di daerah Jakarta.
- 1950
Kutipan
1 lembar
70. Menteri Keuangan: SK Nomor UU 16/9/16 tanggal 16 Agustus 1950 tentang pengangkatan anggota-anggota Panitia Perubahan Sistem Pajak.
- 1950
Kutipan
1 lembar
71. Wakil Menteri Keuangan untuk Jawa Timur: SK Nomor A/1/44/8 tanggal 31 Mei 1950 tentang pembentukan Kantor Kas Negara Pembantu RI di Pacitan.
- 1950
Kutipan
1 lembar
72. Menteri Penerangan: SK-SK tanggal 23 Maret-12 Agustus 1950 tentang Jawatan Penerangan di daerah-daerah.
- 1950
Salinan
10 lembar
73. Menteri Penerangan: SK Nomor 23/50/1500/A.1 tanggal 31 Maret 1950 tentang penghapusan Perwakilan Kementerian Penerangan RI di Jakarta per 1 April 1950.

- 1950
Salinan
2 lembar
74. Menteri Penerangan: SK Nomor 28/U/1763/A.1 tentang penyerahan seluruh Jawatan RRI kepada Kementerian Penerangan RIS dengan ketentuan-ketentuannya.
- 1950
Salinan
2 lembar
75. Kantor Urusan Pegawai (KUP): Surat Edaran (SE) Nomor A.28/1/4 tanggal 23 Januari 1950 tentang hubungan surat menyurat dengan KUP.
- 1950
Salinan
1 lembar
76. KUP: SE Nomor A.27/2/3 tanggal 15 Januari 1950 tentang prosedur tata kepegawaian sehubungan dengan terbatasnya tenaga di KUP.
- 1950
Salinan
3 lembar
77. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perhubungan: SE Nomor 6.40/39/22 tanggal 12 Agustus 1950 tentang pengaturan pergeseran kantor-kantor pemerintah sehubungan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1950
Salinan
1 lembar
78. Menteri Keuangan: Surat Penetapan (SP) Nomor TNU 1/6/11 tanggal 28 Januari 1950 tentang Pembentukan Kantor Pusat Perbendaharaan RI di Bukittinggi, Sibolga, dan Kutaraja.
- 1950
Salinan
1 lembar
79. Menteri Penerangan: SP Nomor 42/U/50 tanggal 15 Agustus 1950 tentang penambahan susunan kantor dan pegawai di Jawatan-Jawatan Penerangan di kota praja-kota praja.
- 1950
Salinan
1 lembar
80. Setneg kepada KUP: Surat-surat tanggal 30 Desember 1949-26 Januari 1950 tentang pembubaran Delegasi Indonesia.
- 1949-1950
Asli
Salinan
Pertinggal
10 lembar

81. Setneg kepada Kementerian Kemakmuran: Surat tanggal 6 Januari 1950 tentang salinan kawat dari Perwakilan RI di Padang mengenai urusan Distributiedienst Belanda dipindahkan ke Jawatan Distribusi RI di Sumatera Tengah, dengan lampiran.
- 1950
Pertinggal
2 lembar
82. DPN kepada eks pegawainya: Surat-surat tanggal 10 Januari-16 Mei 1950 tentang status DPN.
- 1950
Pertinggal
4 lembar
83. Kementerian PU dan Perhubungan kepada Sekretariat Presiden: Surat tanggal 19 Januari 1950 tentang urusan Jawatan Gedung-Gedung Pusat.
- 1950
Asli
1 lembar
84. Masyarakat Kencong Jawa Timur: Mosi tanggal 20 Januari 1950 tentang tuntutan agar jabatan commissaris politik diubah menjadi Gubernur RI.
- 1950
Asli
1 lembar
85. Kementerian-kementerian kepada Setneg: Surat-surat tanggal 26 Januari-15 Maret 1950 tentang susunan, tugas, dan fungsi kementerian-kementerian yang bersangkutan.
- 1950
Asli
Stensilan
9 lembar
86. Setneg kepada Menteri Perdagangan dan Industri: Surat tanggal 31 Januari 1950 tentang pembagian pekerjaan bidang perkebunan antara RI dan RIS, dengan lampiran.
- 1950
Pertinggal
3 lembar
87. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 4 Februari-5 September 1950 tentang perubahan stempel penerimaan instansi-instansi yang bersangkutan.
- 1950
Asli
Tindasan
5 lembar
88. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 7 Februari-14 Agustus 1950 tentang perpindahan instansi-instansi yang bersangkutan.
- 1950
Asli

Salinan
5 lembar

89. Pusat Jawatan Koperasi kepada semua instansi: Surat-surat tanggal 21 Maret 1950 tentang pembukaan Kantor Instansi Jawatan Koperasi Jawa Tengah di Semarang.

1950
Salinan
1 lembar

90. Menteri PU dan Perhubungan: Pengumuman tanggal 22 Maret 1950 tentang penyelenggaraan kelistrikan ditentukan oleh kementerian yang bersangkutan.

1950
Salinan
1 lembar

91. Kementerian PPDK kepada St. Atmodipoero, Wakil Kementerian PPDK: Instruksi tanggal 28 Maret 1950 tentang penyesuaian urusan PPDK mengikuti penyatuan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan.

1950
Tembusan
4 lembar

92. Serikat Buruh Kementerian Perhubungan, Tenaga, dan PU: Resolusi tanggal 1 April 1950 tentang pertanggungjawaban jawatan-jawatan dari kementerian yang bersangkutan.

1950
Tindakan
1 lembar

93. Menteri Perhubungan kepada Menteri Dalam Negeri: Surat tanggal 1 April 1950 tentang penyerahan kewajiban Kementerian Perburuhan kepada pemerintah daerah di provinsi-provinsi, kota-kota besar, kabupaten, dan kota-kota kecil, dengan lampiran.

1950
Tembusan
2 lembar

94. Inspeksi Thesauri Negara RI kepada Thesaurier Jenderal Muda: Surat tanggal 1 April 1950 tentang daftar Kas Negara/Kas Pembantu di Sumatera Tengah, dengan lampiran.

1950
Salinan

2 lembar

95. Dewan Kepemerintahan Sulawesi Utara kepada PJS Presiden: Telegram tanggal 2 Mei 1950 tentang pernyataan bahwa pemerintahannya dalam keadaan demisioner.

1950
Asli
1 lembar

96. Setneg dengan instansi-instansi: Surat menyurat tanggal 3 Juni-8 Agustus 1950 tentang penyelenggaraan surat menyurat dinas.
- 1950
Asli
Pertinggal
9 lembar
97. Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Yogyakarta kepada Setneg: Surat tanggal 22 Juni 1950 tentang pengesahan PMI oleh Presiden RIS, dengan lampiran.
- 1950
Asli
4 lembar
98. Komisaris Daerah Pesindo kepada PJS Presiden: Telegram tanggal 22 Juli 1950 tentang surat yang belum mendapat jawaban.
- 1950
Asli
1 lembar
99. Kementerian Agama kepada Setneg: Surat tanggal 24 Juli 1950 tentang rencana perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33/1949 tentang Kementerian Agama, dengan lampiran.
- 1950
Asli
Stensilan
1 lembar
100. Setneg: Surat-surat pemberitahuan tanggal 9 September 1950 tentang persiapan pindah PJS Setneg Santoso ke Jakarta.
- 1950
Pertinggal
4 lembar

C. PENGATURAN PEGAWAI

101. PP Nomor 1/1950 tanggal 6 Januari 1950 tentang perubahan Pasal 17 PP Nomor 10 Tahun 1949 mengenai uang tunggu bagi para pegawai yang belum diangkat.
- 1950
Salinan
1 lembar
102. PP Nomor 2/1950 tanggal 10 Januari 1950 tentang penetapan peraturan pemberian tunjangan kemahalan kepada pegawai negeri.
- 1950
Salinan
1 lembar
103. PP Nomor 3/1950 tanggal 11 Januari 1950 tentang pemberian uang pemulihan bagi pegawai negeri.
- 1950
Salinan
2 lembar

104. PP Nomor 4/1950 tanggal 11 Januari 1950 tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak-anak pegawai negeri.
- 1950
Salinan
2 lembar
105. PP Nomor 23/1950 tanggal 19 Juni 1950 tentang pemberian tunjangan istimewa bagi janda dan anak-anak pegawai negeri yang meninggal karena keadaan luar biasa.
- 1950
Salinan
1 lembar
106. PJS Presiden: SK-SK tanggal 14 Januari-12 September 1950 tentang pemberhentian beberapa pejabat dari beberapa kementerian.
- 1950
Petikan
1 sampul
107. PJS Presiden: SK_SK tanggal 3 Januari-2 Juni 1950 tentang pengangkatan kepala-kepala pengadilan negeri/pengadilan kepolisian di Blitar, Bukittingi, Kudus, Kediri, Madiun, Magelang, Purworejo, Surakarta, dan Yogyakarta.
- 1950
Pertinggal
1 sampul
108. PJS Presiden: SK-SK tanggal 3 Januari-31 Juli 1950 tentang pengangkatan kepala daerah-kepala daerah di Jawa Barat dan Jawa Timur.
- 1950
Salinan
1 sampul
109. PJS Presiden: SK Nomor 20/P/50 tanggal 3 April 1950 tentang pemberhentian dengan hormat Mr. Maria Ulfah Santoso sebagai anggota Kantor Pemilihan Pusat, dengan lampiran.
- 1950
Asli
Pertinggal
5 lembar
110. Kementerian-kementerian: SK-SK tanggal 21 Desember 1949-15 Agustus 1950 tentang pengangkatan pegawai di lingkungannya masing-masing.
- 1949-1950
Kutipan
1 sampul
111. Kementerian-kementerian: SK-SK tanggal 28 November 1949-11 Desember 1950 tentang pemberhentian pegawai di lingkungannya masing-masing.
- 1949-1950
Salinan
1 sampul

112. Kepala Kantor Urusan Perjalanan: SK Nomor 5/K.U.P.P tanggal 25 Maret 1950 tentang peraturan perjalanan dinas.
1950
Salinan
1 lembar
113. Menteri Penerangan: SK-SK tanggal 25 Maret 1950 tentang pemindahan beberapa pegawai kementerian tersebut ke beberapa instansi.
1950
Salinan
2 lembar
114. Menteri Dalam Negeri: SK Nomor UP.23/G/21 tanggal 16 Agustus 1950 tentang pemberian tunjangan jabatan kepada bupati, walikota, wedana, dan asisten wedana.
1950
Kutipan
1 lembar
115. Menteri Keuangan: SP Nomor TNUP.9/1/24 tentang penunjukan H. Siregar sebagai acting pimpinan Kantor Kas Negara di Telukbetung.
1950
Salinan
2 lembar
116. Menteri Agama: SP Nomor 3/1950 tanggal 4 Mei 1950 tentang formasi dan kedudukan pegawai Pengadilan Agama.
1950
Turunan
1 lembar
117. Gubernur Aceh: SP Nomor 630/G/P tanggal 24 Agustus 1950 tentang pemberhentian OKH Salamuddin dan A. Gafoer Achir dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Pemilihan Daerah (DPD) Aceh.
1950
Petikan
1 lembar
118. Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta: SP Nomor 5/SP/50 tanggal 31 Agustus 1950 tentang pemberhentian dengan hormat M. Djauzi sebagai anggota DPD Yogyakarta.
1950
Kutipan
1 lembar
119. Kantor Urusan Pegawai (KUP) Negeri: SE Nomor A28/1/4 tanggal 23 Januari 1950 tentang penyelesaian surat-surat mengenai kepegawaian.
1950
Salinan
1 lembar

120. KUP Negeri: SE Nomor A28/1/10 tanggal 17 Februari 1950 tentang formasi pegawai di kementerian-kementerian.
- 1950
Salinan
1 lembar
121. KUP Negeri: SE Nomor A14/2/7 tanggal 23 Maret 1950 tentang pemberian tunjangan kepada jabatan-jabatan tertentu.
- 1950
Salinan
1 lembar
122. KUP Negeri: Pengumuman Nomor A100/2/21 tanggal 24 Januari 1950 tentang larangan mengangkat pegawai baru.
- 1950
Salinan
3 lembar
123. Kementerian-kementerian kepada Setneg: Surat-surat tanggal 28 November 1949-11 Juli 1950 tentang pemberhentian para pegawai di lingkungannya masing-masing.
- 1950
Asli
1 sampul
124. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 3 Desember 1949-8 Juni 1950 tentang peraturan gaji pegawai negeri. 1949-1950
- Asli
Salinan
18 lembar
125. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 31 Desember 1949-22 Agustus 1950 tentang perpindahan pegawai dari instansi-instansi tersebut ke jajaran RIS.
- 1950
Asli
Salinan
1 sampul
126. Profesor Doktor Supomo: Catatan tahun 1950 tentang jabatan wakil presiden pada saat Undang-Undang Dasar Sementara berlaku.
- 1950
Konsep
1 lembar
127. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 10 Januari-16 September 1950 tentang tunjangan dan gaji pegawai.
- 1950
Asli
1 sampul

128. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 28 Januari-25 Agustus 1950 tentang para pegawai yang belum ditempatkan.
- 1950
Asli
Tembusan
1 sampul
129. Rapat Raksasa Rakyat Garut: Resolusi tanggal 11 Maret 1950 tentang desakan agar jabatan bupati Garut, residen Priangan, dan gubernur Jawa Barat tetap dipegang oleh orang-orang yang sedang menjabat.
- 1950
Tembusan
1 lembar
130. Setneg kepada Menteri Keuangan: Surat tanggal 27 Maret 1950 tentang peraturan gaji PJS Presiden dan Wakil Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dengan lampiran.
- 1950
Pertinggal
2 lembar
131. Kementerian Perdagangan dan Industri kepada Setneg: Surat tanggal 17 April 1950 tentang pegawai golongan VI/d ke atas di kementerian yang bersangkutan.
- 1950
Asli
2 lembar
132. Kementerian Keuangan dengan instans-instansi: Surat-surat tanggal 14, 26 April dan 6 Mei 1950 tentang peraturan pelaksanaan pengangkatan pegawai baru.
- 1950
Tembusan
6 lembar
133. Menteri Keuangan RI: Maklumat tanggal 19 April 1950 tentang penetapan bupati Kuningan sebagai pemegang kredit pemerintah dalam rangka penukaran uang RI.
- 1950
Tembusan
1 lembar
134. Masyarakat Subang dan sekitarnya kepada PJS Presiden: Revolusi-revolusi tanggal 22 dan 29 April, 1 dan 5 Mei 1950 tentang tuntutan agar Bupati Subang, Hadi Pranoto, segera diganti.
- 1950
Asli
6 lembar
135. Kementerian Penerangan kepada Setneg: Surat-surat tanggal 20 Mei-7 Agustus 1950 tentang pengangkatan RM Haryoto sebagai acting Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan.
- 1950

Konsep
Asli
Salinan
16 lembar

136. Sekretaris Perdana Menteri kepada Setneg: Surat tanggal 30 Mei 1950 tentang rancangan peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan bagi eks Wakil Presiden.

1950
Asli
1 lembar
NB. Tidak lengkap

137. Setneg: Surat-surat keterangan tanggal 30 Mei 1950 tentang jabatan-jabatan yang pernah diduduki oleh Ir. M. Sitompul dan KH. Masjkur.

1950
Salinan
2 lembar

D. ANGGARAN

138. Setneg: SK Nomor -/UP/50 tahun 1950 tentang pembentukan panitia serah terima gedung Istana Presiden.

1950
Petikan
1 lembar

139. Menteri Keuangan: SK Nomor UU 30/4/17 tanggal 15 Juni 1950 tentang peraturan pinjaman untuk pembelian mobil.

1950
Kutipan
3 lembar

140. Menteri Keuangan: SK-SK tanggal 19-31 Desember 1950 tentang pembukaan kredit anggaran untuk anggaran Setneg.

1950
Salinan
3 lembar

141. Inspektur Thesauri Negara RI Jawa Barat: SK Nomor PKK/1/1 tanggal 5 Juli 1950 tentang pemberian kredit anggaran sementara.

1950
Salinan
1 lembar

142. Kepala Jawatan Gedung-Gedung Pusat: SK-SK tanggal 11 Februari-1 Mei 1950 tentang pembangunan perumahan-perumahan.

1950
Salinan
12 lembar

143. Kepala Jawatan Gedung-Gedung Pusat: SK-SK tanggal 15 Februari-3 Agustus 1950 tentang perbaikan gedung-gedung pemerintah.

1950

Salinan
15 lembar

144. Kementerian PU dan Perhubungan kepada Setneg: Surat-surat tanggal 21 Desember 1949-14 Agustus 1950 tentang pengurusan gedung-gedung kantor.

1949-1950
Asli
2 lembar

145. Setneg dan Kantor Urusan Pegawai kepada Kepala Jawatan Gedung-Gedung Pusat: Surat-surat tanggal 5 Januari dan 10 Februari 1950 tentang permintaan gedung yang lebih luas untuk Kantor Urusan Pegawai.

1950
Tindakan
Pertinggal
2 lembar

146. Instansi-instansi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 18 Maret dan 17 Mei 1950 tentang penggunaan anggaran sesuai rencana.

1950
Salinan
3 lembar

147. Setneg kepada Kantor Pusat Perbendaharaan: Surat tanggal 7 Agustus 1950 tentang pembetulan anggaran bulan Mei dan Juni 1950.

1950
Pertinggal
1 lembar

E. PERPAJAKAN

148. Kementerian Keuangan: Pengumuman tanggal 17 Januari 1950 tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

1950
Salinan
1 lembar

149. Setneg dengan Menteri Dalam Negeri: Surat menyurat tanggal 4 Februari 1950 dan 12 Mei 1950 tentang rencana undang-undang mengenai pajak.

1950
Asli
Salinan
3 lembar

150. BPKNIP kepada Setneg: Surat tanggal 29 Maret 1950 tentang tarif pajak potong tahun 1950, dengan lampiran.

1950
Asli
3 lembar

151. Setneg kepada Perdana Menteri: Surat tanggal 12 Mei 1950 tentang mosi keberatan dari Gabungan Perusahaan Rokok Blitar terhadap peraturan cukai tembakau.

1950
Pertinggal
3 lembar

152. BPKNIP kepada Menteri Keuangan: Surat tanggal 19 Mei 1950 tentang rencana undang-undang tarif pajak tahun 1950.

1950
Tembusan
2 lembar

F. PEREDARAN UANG

153. Menteri Keuangan: SK-SK tanggal 19 Januari-1 Agustus 1950 tentang pelaksanaan undian oleh Bank Negara.

1950
Kutipan
4 lembar

154. Setneg: SK-SK tanggal 6 Februari dan 1 Maret 1950 tentang penyelesaian utang-utang negara.

1950
Kutipan
3 lembar

155. Kementerian Keuangan RIS: SE Nomor 107698/PAP tanggal 24 Mei 1950 tentang pembelian sertifikat devisa oleh RIS untuk pemindahan uang keluar negeri.

1950
Salinan
1 lembar

156. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Jakarta kepada Setneg: Seri nota tanggal 4 November 1949-21 Januari 1950 tentang pengeluaran uang yang dilakukan kantor perwakilan tersebut.

1949-1950
Tindakan
11 lembar

157. Kementerian Keuangan kepada Setneg: Surat-surat tanggal 20 Januari-30 Juli 1950 tentang pinjaman nasional.

1950
Salinan
7 lembar

158. Kementerian Keuangan RIS: Pengumuman tanggal 25 Januari 1950 tentang penggunaan uang ORI sejak penyerahan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949.

1950
Turunan
1 lembar
NB. Dilaminasi

159. DPN kepada Hardjosuparto: Surat tanggal 19 April 1950 tentang tagihan dari Kementerian Sosial untuk operasi sosial.

1950
Tindakan
1 lembar

160. Residen Malang kepada Gubernur Jawa Timur: Telegram tanggal 13 April 1950 tentang instruksi pelaksanaan penukaran uang ORI di daerah Renville RI di Malang.

1950
Tindakan
2 lembar

161. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara kepada Kementerian PPDK: Surat tanggal 17 Mei 1950 tentang kredit untuk Sumatera Tengah.

1950
Tembusan
1 lembar

G. AGAMA

162. Menteri Agama: SK-SK tanggal 31 Januari dan 25 April 1950 tentang pembentukan-pembentukan panitia penyelidikan Al-Quran.

1950
Petikan
3 lembar

163. Menteri Agama: SK Nomor 51/A/D/b.6 tanggal 22 Mei 1950 tentang pembentukan panitia penyelesaian Darul Islam yang berkedudukan di Yogyakarta.

1950
Turunan
3 lembar

164. Menteri Agama: SP Nomor 2/50 tentang pencabutan kembali penetapan terdahulu mengenai biaya pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk daerah Jawa dan Madura.

1950
Turunan
1 lembar

165. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 20 Februari 1950 tentang sambutan Gatot Subroto dalam rangka tahun baru Imlek.

1950
Asli
1 lembar

166. Menteri Agama: Peraturan Menteri Nomor 4/1950 tanggal 4 Mei 1950 tentang pembatalan peraturan mengenai biaya perkara pengadilan agama di Jawa dan Madura.

1950
Turunan
1 lembar

167. Kementerian Agama kepada Setneg: Surat-surat tanggal 20 Mei-23 Agustus 1950 tentang pemeriksaan terhadap jamaah haji.

- 1950
Asli
6 lembar
168. Raja Yaman kepada PJS Presiden: Telegram tanggal 18 Juni 1950 tentang bulan suci Ramadhan.
- 1950
Asli
3 lembar
169. Petugas Sosial Kecamatan Jatisari kepada Setneg: Surat tanggal 8 Juli 1950 tentang permintaan sumbangan untuk hari lebaran bagi anak-anak yatim.
- 1950
Asli
1 lembar
170. Jawatan Penerbangan Sipil kepada Setneg: Surat tanggal 11 Juli 1950 tentang penerbangan sipil menyambut hari lebaran.
- 1950
Pertinggal
4 lembar

H. PENDIDIKAN

171. Menteri Kesehatan: SK Nomor 1811/Pend/9 tanggal 29 Agustus 1950 tentang pembukaan Kursus Pendidikan Penyelidik Mayat di Yogyakarta.
- 1950
Kutipan
2 lembar
172. Menteri PPDK: SK Nomor 7265/A tanggal 15 Agustus 1950 tentang penunjukan pengurus yayasan Fonds Universitas Gadjah Mada.
- 1950
Kutipan
1 lembar
173. Kementerian PPDK: SE Nomor 3252/A tanggal 10 Mei 1950 tentang penyusunan kamus istilah oleh Balai Bahasa.
- 1950
Kutipan
2 lembar
174. Kementerian PPDK kepada KUP Negeri: Surat tanggal 14 Februari 1950 tentang penghargaan ijazah sekolah swasta sebelum tahun 1947.
- 1950
Tembusan
1 lembar
175. Corps Mahasiswa Pusat kepada PJS Presiden: Surat tanggal 17 Februari 1950 tentang cara mengimbangi kekurangan tenaga pengajar.
- 1950
Asli
3 lembar

176. Organisasi-organisasi massa di Pulau Jawa kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 13, 22, dan 27 April 1950 tentang reaksi terhadap UU Pokok Pendidikan.
- 1950
Asli
3 lembar
177. Jawatan Pendidikan Masyarakat Kementerian PPDK kepada Setneg: Surat tanggal 18 April 1950 tentang resolusi Tjandiroto mengenai pendidikan.
- 1950
Asli
2 lembar
178. Kementerian Kesehatan kepada Setneg: Surat tanggal 30 Juni 1950 tentang ikatan dinas bagi siswa Sekolah Ahli Analis.
- 1950
Asli
1 lembar
179. Menteri PPDK kepada PJS Presiden: Surat tanggal 18 Juli 1950 tentang perubahan bentuk akademi di UGM.
- 1950
Tembusan
2 lembar
180. UGM kepada R. Pitoyo: Surat tanggal 3 Agustus 1950 tentang ujian masuk UGM.
- 1950
Asli
1 lembar

I. KESEJAHTERAAN SOSIAL

181. Pengurus Besar Partai Indonesia Rakyat (PB Parindra) kepada PJS Presiden: Surat tanggal 16 Februari 1950 tentang transmigrasi menurut Ir. Dipokusumo, anggota Parindra.
- 1950
Asli
2 lembar
182. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram-telegram tanggal 6 Februari-16 Maret 1950 tentang pemogokan kaum buruh di beberapa tempat menuntut kenaikan upah.
- 1950
Asli
13 lembar
183. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 1 Maret 1950 tentang berita pengembalian pengungsi Tionghoa Semarang yang dahulu pindah atas perintah Belanda.
- 1950
Asli
1 lembar

184. Panitia Pertimbangan dan Penyelenggaraan Warga Negara Indonesia keturunan Arab, Surakarta kepada PJS Presiden: Surat Maret 1950 tentang penghapusan golongan minoritas.
- 1950
Asli
2 lembar
185. Anwar, anggota DPR Sumatera Tengah, kepada PJS Presiden: Surat tanggal 29 Maret 1950 tentang permintaan hiburan untuk rakyat Sumatera Tengah.
- 1950
Asli
3 lembar
186. Kantor Perumahan Verhuis, NV Madiun, kepada Bupati Ngawi: Surat tanggal 13 April 1950 tentang pengembalian tanah milik perorangan.
- 1950
Tindasan
2 lembar
187. PB Muhammadiyah kepada PJS Presiden: Surat tanggal 18 April 1950 tentang permainan roulet dan tambola di ibukota.
- 1950
Asli
1 lembar
188. Federasi Buruh Indonesia: Seruan tanggal 20 April 1950 tentang penurunan harga-harga kebutuhan masyarakat yang terlalu mahal.
- 1950
Stensilan
1 lembar
189. Organisas-organisasi massa kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 11 Mei-4 Juli 1950 tentang penguasaan tanah.
- 1950
Asli
7 lembar
190. Kementerian Perburuhan RI kepada Departemen Pelayaran Gunung Sahari: Surat bulan Juni 1950 tentang nasib para pelayar.
- 1950
Tindasan
3 lembar
191. Jawatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Jawatan RRI: Surat bulan Juni 1950 tentang permohonan pesawat radio untuk Corp Invalid Yogyakarta.
- 1950
Tembusan
2 lembar
192. Setneg kepada Sekjen Kementerian Luar Negeri: Surat tanggal 25 Agustus 1950 tentang anak R. Sasmojo yang hilang saat berjuang.

- 1950
Pertinggal
2 lembar
193. Kementerian Sosial kepada Kepala Inspeksi Sosial Provinsi Sumatera Tengah: Surat tanggal 28 Agustus 1950 tentang pertolongan untuk rakyat kampung Lumban Nainggolan.
- 1950
Tindakan
1 lembar
194. Kementerian PU dan Perhubungan kepada Menteri PU dan Perhubungan: Surat tanggal 1 September 1950 tentang nasib buruh perkapalan Tegal.
- 1950
Tindakan
1 lembar

III. LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA

195. PP Nomor 5 Tahun 1950 tentang penunjukan anggota-anggota Senat RIS dan RI.
- 1950
Turunan
3 lembar
196. PJS Presiden: SK-SK tanggal 8-15 Agustus 1950 tentang penunjukan anggota-anggota DPR.
- 1950
Petikan
11 lembar
197. Surat-surat kepada PJS Presiden: Tanggal 18 Maret 1950 tentang penggantian anggota-anggota KNIP.
- 1950
Asli
6 lembar
198. Surat-surat kepada PJS Presiden: Tanggal 14 Desember 1949-7 Agustus 1950 tentang pencalonan anggota-anggota KNIP.
- 1949-1950
Asli
5 lembar
199. Partai Sosialis Sumatera Tengah kepada ketua DPR RIS: Surat tanggal 24 Maret 1950 tentang pencalonan Dr. Rahim Usman menjadi anggota KNIP dan DPRST (DPR Sumatera Tengah).
- 1950
Tembusan
1 lembar
200. HM. Ahmadian Mahmud, anggota KNIP kepada KNIP: Surat bulan Mei 1950 tentang berhentinya Sultan Kota Waringin.
- 1950
Tembusan

- 1 lembar
201. Sekretaris BPKNIP kepada Menteri Perburuhan: Surat tanggal 13 Mei 1950 tentang rapat kerja Seksi III dengan kementerian yang bersangkutan.
- 1950
Tembusan
1 lembar
202. BPKNIP: Risalah sidang KNIP ke-4.
- 1950
Salinan
1 sampul
203. Sekretariat BPKNIP kepada Setneg: Surat tanggal 22 Juni 1950 tentang susunan seksi-seksi pada BPKNIP, dengan lampiran.
- 1950
Asli
3 lembar
204. Surat-surat kepada PJS Presiden: Tanggal 22 Desember 1950 tentang pencalonan anggota-anggota DPR RIS.
- 1950
Asli
Tembusan
1 sampul
205. Sekretaris Perdana Menteri RIS kepada Setneg: Telegram-telegram tanggal 5 dan 6 Februari 1950 tentang kedatangan anggota-anggota senat dan DPR RIS di Jakarta.
- 1950
Asli
2 lembar
206. Sekretaris Perdana Menteri kepada Pemerintah RI Yogyakarta: Telegram tanggal 6 Februari 1950 tentang anggota senat dan DPRS yang tertua.
- 1950
Asli
5 lembar
207. Telegram-telegram kepada Setneg: Tanggal 20 Februari-30 Mei 1950 tentang sidang pleno DPRS.
- 1950
5 lembar
208. Surat-surat kepada Setneg: Tanggal 20 Desember 1949-13 Februari 1950 tentang pencalonan anggota-anggota DPRS RIS.
- 1950
15 lembar
209. DPA kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 4 dan 23 Januari serta 2 Februari 1950 tentang kewajiban DPA.
- 1950
Asli

3 lembar

210. Sekretariat DPA kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 20 April-31 Juli 1950 tentang undangan sidang DPA ke-XXV-XXIX.

1950
Asli
6 lembar

211. DPA kepada Setneg: Surat tanggal 8 Mei 1950 tentang pelaksanaan sidang DPA tanggal 20 Mei 1950.

Asli
2 lembar

IV. SIKAP POLITIK

212. PP Nomor 9/1950 bulan Mei 1950 tentang penyelenggaraan UU Nomor 27/1948 tentang pemilihan umum.

1950
Salinan
1 lembar
NB. Tidak lengkap

213. Organisasi-organisasi massa di Madura kepada Setneg: Surat-surat tanggal 4 Januari dan 19 April 1950 tentang keadaan politik di Madura.

1950
Salinan
Asli
4 lembar

214. Organisasi-organisasi massa di Pulau Jawa kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 11 Januari-28 Agustus 1950 tentang penolakan terhadap negara serikat.

1950
Asli
Salinan
1 sampul

215. Partai Serikat Islam di Jawa Barat kepada PJS Presiden: Telegram-telegram tanggal 21-27 Januari 1950 tentang pembentukan Kabinet Halim.

1950
Asli
5 lembar

216. Organisasi-organisasi massa di Sumatera kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 6 Februari-10 Mei 1950 tentang keberadaan organisasi-organisasi yang bersangkutan.

1950
Asli
1 sampul

217. Serikat Dewan Menteri kepada PJS Presiden: Surat tanggal 6 Februari dan 7 Agustus 1950 tentang sidang kabinet.

1950
Asli

2 lembar

218. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 7 Februari 1950 tentang penjelasan Sjahrir sebelum memimpin konferensi Dewan Pimpinan Partai Serikat Islam di Yogyakarta.
- 1950
Asli
3 lembar
219. Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (PG IPPI) kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 7 Februari-13 Maret 1950 tentang kegiatan-kegiatan organisasi yang bersangkutan.
- 1950
Asli
8 lembar
220. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 16 Februari 1950 tentang situasi sidang kabinet yang tidak menarik para politikus.
- 1950
Asli
1 lembar
221. The Salvation Army - Bala Tentara Keselamatan kepada PJS Presiden: Surat tanggal 25 Februari 1950 tentang bala tentara keselamatan di Indonesia, dengan lampiran.
- 1950
Asli
7 lembar
222. Persatuan Rakyat Silaukaken dan Bedagis Hulu: Resolusi tanggal 2 Maret 1950 tentang dukungan terhadap hasil Konferensi Meja Bundar.
- 1950
Asli
1 lembar
223. Organisasi-organisasi massa di Sumatera kepada PJS Presiden: Surat-surat tanggal 3 Maret-15 Agustus 1950 tentang kembalinya Negara Sumatera Timur ke NKRI.
- 1950
Asli
Salinan
1 sampul
224. Rakyat Kabupaten Bondowoso kepada Menteri Dalam Negeri: Surat tanggal 8 Maret 1950 tentang Bupati Bondowoso yang tidak sesuai dengan cita-cita rakyatnya.
- 1950
Tindakan
1 lembar
225. Organisasi-organisasi massa di Sulawesi kepada Setneg: Surat-surat tanggal 6 April-21 Mei 1950 tentang penolakan terhadap negara serikat.
- 1950

- Salinan
1 sampul
226. Tj. Manggolo kepada PJS Presiden: Surat tanggal 21 April 1950 tentang kecaman atas kepemimpinan Mr. Assaat sebagai PJS Presiden.
- 1950
Asli
1 lembar
227. Organisasi-organisasi massa di Sumatera kepada Setneg: Surat-surat tanggal 21 Mei-15 Juli 1950 tentang perwakilan anggota organisasi tersebut di kantor pemilihan.
- 1950
Asli
Salinan
5 lembar
228. Lembaga Gabungan Organisasi Pemuda dan Petani Jawa Barat: Resolusi bulan Agustus 1950 tentang ketaatan dan kepatuhan organisasi yang bersangkutan kepada kepemimpinan Soekarno.
- 1950
Salinan
1 lembar

V. PERTAHANAN KEAMANAN

229. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 27 Januari 1950 tentang pencurian mobil-mobil di Jawa Tengah.
- 1950
Asli
1 lembar
230. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 15 Februari 1950 tentang pengacau Darul Islam.
- 1950
Asli
1 lembar
231. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram-telegram tanggal 20, 21 Februari dan 29 Maret 1950 tentang pemberontak Westerling.
- 1950
Asli
4 lembar
232. Pers Kedaulatan Rakyat kepada Setneg: Telegram tanggal 21 Februari dan 1 Maret 1950 tentang Darul Islam.
- 1950
Asli
2 lembar
233. Kementerian Penerangan kepada PJS Presiden: Surat tanggal 17 Maret 1950 tentang keamanan dan keberadaan UUD RIS yang menghalang-halangi persatuan, dengan lampiran.
- 1950

- Asli
4 lembar
234. Jawatan Kepolisian Negara kepada PJS Presiden: Surat tanggal 12 Mei 1950 tentang tindakan anggota-anggota Komando Daerah Militer (KODIM) Pasir Jambu yang meresahkan penduduk, dengan lampiran.
- 1950
Asli
7 lembar
235. DPA kepada Setneg: Surat tanggal 5 Juli 1950 tentang tanggapan DPA terhadap insiden di Istana Presiden.
- 1950
Asli
1 lembar
236. Intel Kementerian Pertahanan kepada Setneg: Surat tanggal 22 Juli 1950 tentang pendirian Biro Pendidikan Interl di Yogyakarta.
- 1950
Asli
1 lembar

VI. PERADILAN

237. Presiden RI: SP-SP tanggal 29 Juni-21 Desember 1949 tentang penolakan terhadap permohonan grasi.
- 1949
Kutipan
9 lembar
238. Presiden RI: SP-SP tanggal 29 Juli dan 6 Oktober 1949 tentang pemberian grasi kepada pemohonannya.
- 1949
Kutipan
6 lembar
239. Kejaksaan Agung Yogyakarta kepada Panglima Tinggi Gubernur Militer Jawa Timur: Surat tanggal 5 Januari 1950 tentang permintaan penjelasan mengenai penahanan RDT Sosrokardono.
- 1950
Tembusan
3 lembar
240. Surat-surat kepada PJS Presiden: Tanggal 11 Januari-26 Agustus 1950 tentang permohonan grasi.
- 1950
Asli
Salinan
1 sampul
241. Kantor Pusat Kependidikan kepada Setneg: Surat tanggal 7 Februari 1950 tentang peraturan pemerintahan mengenai rumah tutupan.
- 1950
Asli

1 lembar

242. Dewan Pimpinan Ikatan Pemuda Bekas Tawanan kepada PJS Presiden: Surat tanggal 10 Maret 1950 tentang pembebasan tahanan.

1950

Asli

1 lembar

243. BPKNIP kepada Menteri Kehakiman: Surat-surat tanggal 14 Juni 1950 tentang mosi Tjugito dan kawan-kawan mengenai orang hukuman, dengan lampiran.

1950

Tembusan

5 lembar

DAFTAR INDEKS

Aceh	53, 117
Achir, Gafoer A.	116, 117
Agama	40, 60-64, 99, 116, 162-171
Ahmad, R.	7
Al Quran	162
Anwar	186
Arab	185
Assaat, Mr.	227
Atmodipoero, St.	91
Aziz, Andi	42
Belanda	4, 43, 184
Blitar	107, 151
Bondowoso	225
Brigade 17 Detasemen III	25
Bukittinggi	66, 78, 107
Cucukan, desa	171
Daerah Swapraja	54, 55
Dalam Negeri	21, 50, 225
DAMRI	32
Devisa	155
Dewantoro, KH	27
Dipokusumo, Ir.	182
Djauzi, M.	118
DPA	210-212, 236
DPN	3, 5, 82, 159
DPR	197, 200, 207-209
Gadjah Mada, Universitas	173, 180, 181
Gaji dan tunjangan	1, 10, 102, 104, 105, 114, 121, 124, 127, 186
Garut	129
Gedung-Gedung Pusat, Jawatan	142, 143, 145

Grasi	238, 239, 241
Hadipranoto	134
Haji	167
Halim, Kabinet	216
Haryoto, RM	135
India	22
Indonesia, Delegasi	33
Indragiri	55
Inggris	45
Inspeksi Thesauri Negara	65, 68
IPPI	220
Islam	54, 63, 64, 163, 171, 172, 216, 219, 263
Istana Presiden	7, 23, 27
Jakarta	61, 69, 73, 100, 206
Jatisari, kecamatan	169
Jawa, pulau	166, 177, 215
Jawa Barat	49, 62, 108, 129, 229
Jawa Tengah	17, 43, 49, 52, 84, 108, 160, 240
Jawa Timur	48, 49, 52, 84, 108, 160, 240
Kalimantan Selatan	91
Kalimantan Timur	91
Kedaulatan Rakyat, Pers	165, 183, 184, 221, 230-233
Kediri	107
Kehakiman, Kementerian	244
Kemakmuran, Kementerian	18, 57
Kendaraan Dinas	32, 39
Kesehatan, Kementerian	179
Keuangan, Kementerian	38, 65-71, 132, 133, 153, 155-158
KMB	44, 223
Kongres	26, 55
Koordinator Agama, Kantor	60
Kredit Anggaran	14

Kudus	107
Kuningan	133
Kunjungan	16-22
KU Pegawai	75, 80, 119-122, 145, 175
KU Perjalanan	112
Lebaran	169, 170
Luar Negeri, Kementerian (RIS)	193
Madiun	107, 187
Madura	47, 52, 214
Magelang	107
Mahmud, Ahmaddin, HM	201
Malang	160
Masjur, KH.	137
Masjumi	55
Muhammadiyah	188
Nehru, Jawaharlal	22
Ngawai	187
NKRI	29, 224
ORI	158, 160
Pacitan	71
Pajak	148-152
Parindra	182
Pasir Jambu	235
Penerangan, Kementerian	24, 41, 72-74, 113
Perburuhan, Kementerian	93
Perdagangan dan Industri, Kementerian	131
Pengawas Kas Negeri, Kantor	66
Persediaan Makanan Rakyat, Kementerian	57
Perwakilan Agama, Kantor	61
Pinjaman Nasional	157
PMI	97
PPDK, Kementerian	173-175, 178, 180

Priangan	129
PU dan Perhubungan, Kementerian	77, 83, 90, 144, 195
Purworejo	107
Raja Yaman	168
Ramadhan, bulan	168
Renville	160
RRI	42, 74, 192
RIS	18, 22, 46, 47, 74, 86, 97, 125, 155, 196, 205, 206
Roulet dan tambola, permainan judi	188
Samarinda	33
Santoso	100
Santoso, Maria Ulfah, Mr.	169
Sasmojo, R.	193
Semarang	89, 165, 184
Senat RIS	196
Sibolga	78
Siregar, H. Ir.	115
Soeharjo, R.	7
Soekarno, Ir.	22, 229
Sosial, Kementerian	159
Sutarjo	27
Subang	134
Subroto, Gatot	17
Sulawesi	20, 226
Sulawesi Utara	95
Sumatera	51, 58, 60, 217, 228
Sumatera Barat	51
Sumatera Tengah	48, 161, 186
Sumatera Timur	224
Sumbawa	20
Surabaya	107, 185
Surakarta	54, 107

Supomo, Prof. Dr.	126
Tegal	195
Telukbetung	115
Tembakau	151
Tionghoa	184
Tjandiroto	178
Tjugito	244
Usman, Rahim, Dr.	200
UUDS	126
Vander Zwaal, J. Dr.	21
Westerling	42
Worang, BAT	42
Yogyakarta	9, 19, 48, 49, 107, 118, 163, 172, 192, 207, 237, 240